

LKM Muhammadiyah : Sebuah Model Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan



Ishomuddin

Dosen FAI UMM

Muhammadiyah kembali membuat terobosan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Terobosan baru itu berupa pendirian Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM). Lembaga keuangan ini dikelola secara lebih profesional untuk membantu masyarakat ekonomi bawah yang mempunyai potensi berkembang. Salah satu fungsi atau tujuan LKM adalah membantu masyarakat menyediakan sistem sumber, terutama dana untuk mengembangkan usaha kecil masyarakat bawah. Kehadiran LKM setidaknya sangat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan (ekonomi) masyarakat di pedesaan lebih baik dari sebelumnya.

Selama beberapa Pelita, dan berlanjut secara konsisten pada pelita-pelita mendatang, Pemerintah telah dan sedang mengembangkan strategi-strategi yang diharapkan cukup ampuh dalam memerangi kemiskinan di kalangan masyarakat, melalui kekuatan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Bertumpu pada sifat dan kemampuan seperti itu, dirasa sebagai jalan keluar yang paling efektif dalam memecahkan masalah mengingat perkembangannya berbagai kepentingan yang majemuk dan bertumbuh di kalangan masyarakat. Walaupun demikian dalam hal-hal tertentu, pemerintah memerlukan turun tangan guna memperkuat potensi masyarakat tersebut (Maskun, 1993). Pembangunan manusia tidaklah hanya menyangkut satu atau lebih faktor-faktor tertentu, tetapi merupakan akibat dari bekerjanya semua faktor sekaligus yaitu kebijaksanaan dan program pemerintah, struktur ekonomi dan sosial, keadaan sumberdaya regional, perkembangan politik dan sejarah. Dalam hubungan ini pemerintah dengan kebijaksanaan dan program-programnya memegang kunci dan peranan sangat menentukan, suatu peranan yang membutuhkan tingkat campur tangan yang tepat atau optimum, tidak kurang dan tidak lebih. Peranan pemerintah disamping mengarahkan dan mendorong pembangunan nasional (dan pembangunan pedesaan), harus pula mampu secara langsung menyentuh manusianya. Inilah hakekat pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN. "Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruh masyarakat Indonesia".

Ada beberapa strategi yang erlu dilakukan oleh pemerintah menurut Sumitro Maskun antara lain yaitu :

- Strategi pembangunan masyarakat desa adalah membantu masyarakat untuk dapat

membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri (*to help people to help themselves*).

- Mengefektifkan kebijaksanaan dan program-program pembangunan desa dengan cara menumbuhkan dan mengefektifkan peran serta (partisipasi) masyarakat sebagai kunci daya gerak masyarakat dalam setiap pembangunan desa.
- Pembangunan masyarakat desa selalu mengusahakan agar dapat memecahkan permasalahan pembangunan pedesaan dengan langkah pertama adalah mengusahakan dapat tersalurnya aspirasi masyarakat desa, sehingga dapat menumbuhkan gairah dan kepercayaan serta semangat membangun di kalangan masyarakat.
- Untuk mencapai keberhasilan yang optimum, dari usaha-usaha pembangunan desa yang diusahakan oleh sektor-sektor, maka program-program pembangunan desa, harus benar-benar dapat mengetahui dan memprogramkan secara tepat kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.
- Setiap program pemerintah dalam pembangunan desa, lebih diharapkan untuk dapat dicapainya dampak yang berkepanjangan dari suatu segi pembangunan (*multiplier effects*).
- Proses pelaksanaan politik pembangunan desa, lebih banyak dilakukan secara desentralistis dan proses dekonsentrasi semakin dikurangi. Dalam hal ini daerah akan lebih berperan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat desa, dan pembangunan desa lebih dilaksanakan secara otonomi.
- Program akan lebih banyak berupa program-program yang secara langsung menyentuh hajat hidup dan kepentingan masyarakat. Dana-dana negara yang ditujukan

bagi pembangunan masyarakat desa akan sebagian besar dapat dirasakan langsung dan tepat penggunaannya sesuai kebutuhan oleh masyarakat desa.

- Program pembangunan masyarakat desa akan lebih berorientasi kepada pembangunan manusia sebagai unsur masyarakat (*man oriented, people centred*).
- Pembangunan desa akan dilakukan secara demokratis, mengutamakan peningkatan kehidupan ekonomi rakyat, berdasarkan peningkatan usaha-usaha sosial masyarakat, dan tidak meninggalkan konsepsi yang berlandaskan pada agama.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan politik pemerintah dalam bidang pembangunan Nasional dan Regional. Partisipasi masyarakat dapat digerakkan dengan mengusahakan understanding masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan pemerintah memberikan pemecahan masalah masyarakat dan terciptanya kondisi aparatur pemerintah sebagai "solidarity makers".
- Menciptakan kemampuan masyarakat untuk menetralkan kondisi-kondisi birokratis administrasi pemerintah, sehingga keswadayaan masyarakat tidak terkena sistem formal.

Masyarakat agar menciptakan sistem kemandirian dan kewiraswastaan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Sikap hidup dan keswadayaan dan kemandirian masyarakat tidak terpola oleh sistem dan efek-efek birokratis formal, yang lama kelamaan dan menjadikan masyarakat berpola hidup kaku dan akhirnya merupakan hambatan untuk berkembang dan berkarya secara leluasa.

Konsep Ekonomi Pedesaan

Ekonomi desa adalah kehidupan perekonomian masyarakat dalam skala mikro, yang per-

tumbuhannya banyak diperlukan oleh tingkat produktifitas desa yang bersangkutan, baik yang didasarkan pada sumber kekayaan dan sumber daya alam lingkungan, maupun yang tercipta karena meningkatnya produktifitas sumber daya manusia di pedesaan dalam bentuk pelayanan yang diciptakan di masyarakat.

Usaha ekonomi desa dapat diusahakan atau berlangsung secara masal, meliputi hampir seluruh kehidupan ekonomi desa dan pertanian baik dalam bentuk produk pertanian ataupun berupa hasil industri kecil dan kerajinan masyarakat setempat, yang telah dialaminya secara tradisional bertahun-tahun. Usaha masal tersebut memerlukan usaha-usaha bersama, permodalan, manajemen yang sederhana, dan usaha-usaha pemasaran, baik untuk pemasaran dalam negeri maupun pemasaran internasional. Dalam hal ini suatu usaha yang mengarah kepada suatu bentuk manajemen yang dapat mengefektifkan sistem pemasaran hasil produksi desa, terutama hasil produksi bidang pertanian, sangat dibutuhkan. Pemecahan masalah pemasaran, dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi desa, terutama pemasaran hasil-hasil di bidang agroindustri benar-benar merupakan political will yang diharapkan dari pemerintah dan usahawan-usahawan perantara dari kalangan swasta Indonesia, baik dari usahawan dan kalangan yang masih lemah, sedang maupun besar.

Ekonomi desa, sebagai disebutkan di atas erat kaitannya dengan karakter dan potensi lingkungan. Satu, atau beberapa wilayah pedesaan dapat merupakan area komoditi pertanian tertentu, sehingga usaha-usaha industri dapat lebih efisien diarahkan kepada potensi komoditi tersebut.

Usaha ekonomi desa dalam proses pertumbuhannya diarahkan pula untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan

anggota masyarakat pedesaan, dan harus dapat dicegah bahwa masyarakat dapat menjadi korban mekanisme ekonomi pasar. Atas dasar itulah mekanisme ekonomi pedesaan yang tradisional (substansional) perlu dipertahankan agar tidak terjadi pergeseran yang berlebihan pada mekanisme sistem pasar yang mengakibatkan hilangnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam produktifitas, memudarnya ikatan-ikatan sosial, dan solidaritas. Penciptaan usaha agroindustri di pedesaan, adalah dimaksudkan dapat memberikan kondisi kesempatan kerja, yang baik secara langsung maupun tidak langsung mampu menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat. Dalam skala ini pula ekonomi desa akan mengarah kepada pemerataan pembangunan, yang tersalur melalui mekanisme pasar atau sistem investasi permodalan melalui usaha di bidang industri agro. Dengan perkataan lain usaha ekonomi desa bertujuan mengangkat kondisi ekonomi masyarakat desa, yang sementara ini didominasi oleh usaha-usaha pertanian tradisional, ke tingkat yang lebih baik dan berorientasi kepada teknologi dan efisiensi.

Perkembangan ekonomi di desa akan mempunyai dampak atas penciptaan lembaga-lembaga perekonomian di wilayah pedesaan, yang dapat memberikan pelayanan manajemen bagi perkembangan ekonomi masyarakat desa. Lembaga-lembaga tersebut dapat bersifat tradisional dan yang lama telah dikenal masyarakat atau dengan cara menciptakan lembaga baru, mulai dengan cara pemanfaatan sistem koperasi desa sampai kepada sistem usaha bapak angkat atau anak angkat. Usaha ekonomi desa memerlukan pembinaan, penelitian dan pengembangan secara terus menerus. Dalam hal tertentu usaha ekonomi desa perlu didukung oleh informasi, pelatihan dan pendidikan, yang diarahkan baik bagi pelaku-pelaku ekonomi di pedesaan maupun perangkat desa. Selanjutnya,

usaha ekonomi desa dapat dijalankan secara mikro dalam arti dimulai dengan kecil-kecilan untuk menampung informal sektor. Informal sektor perlu digalakkan pengembangannya dalam perannya meniadakan pengangguran. Dan setiap usaha-usaha ekonomi desa dapat ditunjang atau didukung oleh sektor-sektor lain yang mungkin sifatnya nonekonomis seperti kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang didukung oleh nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat desa. Melalui usaha pelayanan masyarakat atas objek-objek budaya atau objek yang bernilai sejarah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Objek pembangunan yang mengarah kepada usaha ekonomi desa antara lain adalah :

- Usaha-usaha perkreditan desa baik secara kelembagaan tradisional maupun ciptaan baru. Usaha-usaha perkreditan ini, bersifat sederhana dan menjangkau setiap warga.
- Usaha-usaha industri kecil pedesaan (*rural industries*) yang menyerap tenaga ke wilayah pedesaan. Setidak-tidaknya keadaan ini dapat menekan migrasi tenaga untuk bergerak ke kota.
- Usaha peningkatan pelayanan oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis dalam bentuk tambahan pendapatan bagi masyarakat.
- Usaha-usaha perkoperasian oleh pemerintah desa yang dapat meningkatkan pendapatan dan pemasukan ke kas desa, dan membantu usaha ekonomi masyarakat.
- Pasar swadaya desa, yaitu sebagai fasilitas untuk transaksi usaha masyarakat yang bernilai ekonomi. Pasar desa adalah merupakan pusat kegiatan transaksi ekonomi masyarakat dan pusat pengumpulan hasil-hasil produksi masyarakat. Dengan terciptanya pusat ini, maka diharapkan akan ter-

jadi kegiatan ekonomi yang sederhana mempertemukan supply dan demand yang ada di desa atau di luar desa. Dengan demikian pasar desa dapat bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari penduduk desa. Dalam rangka pembinaan pasar desa perlu diperhatikan pemilihan lokasi, dampak terhadap lingkungan, besarnya investasi desa, retribusi sebagai pendapatan desa dan "penjaringan" tenaga kerja untuk tinggal di desa (Maskun).

Muhammadiyah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan

Sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4, dijelaskan sebagai berikut : "Menggerakkan dan menghidup-suburkan amal, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga berencana". Maka agar amaliyah dalam kehidupan sehari-hari dapat mengena pada sasaran sebagaimana yang dimaksud dalam al-qur'an, kegiatan tersebut harus diarahkan agar bisa produktif, efisien dan berkesinambungan serta terorganisir atau dilembagakan.

Dengan demikian semangat persamaan serta perhatian terhadap kaum lemah tetap terpelihara. Dari hal semacam inilah yang pada akhirnya melahirkan wadah organisasi di dalam Muhammadiyah yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah kemiskinan. Wadah atau mekanisme tersebut melakukan amal usaha sebagai berikut : (1) Penyantunan fakir miskin (2) Pembinaan anak yatim (3) Khitanan massal, dengan tujuan meringankan beban bagi mereka yang tidak mampu (4) Pembaharuan sistem pelaksanaan zakat fithrah dan penyembelihan kurban, sesuai dengan syariat Islam. Mendirikan balai pengobatan untuk membantu kaum lemah.

Agar amal usaha ini akan mencapai hasil

yang optimal, maka melalui Majelis yang ada di dalam Muhammadiyah, seperti halnya PKU (Pembinaan Kesejahteraan Ummat), LKM (Lembaga Keuangan Masyarakat), mengadakan terobosan baru dalam masalah sosial ekonomi. PKU berkehendak menjangkau lingkup usaha yang luas dan berbobot yaitu kesejahteraan bagi seluruh umat.

Pada tahun pertama, membina pribadi tiap individu yang dilanjutkan dengan peningkatan pada pembinaan keluarga sebagai kesatuan yang membentuk masyarakat. Pembinaan keluarga dan masyarakat, difokuskan pada usaha-usaha :

- Untuk menanamkan, meresapkan dan melaksanakan kehidupan beragama serta memantapkan pengertian iman dan Islam serta pembinaan akhlak menurut tuntunan Allah dalam kehidupan sehari-hari.
- Menggerakkan, meningkatkan serta mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi.

Lembaga Keuangan Masyarakat

Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dalam tubuh organisasi Muhammadiyah, dimana lembaga tersebut berusaha untuk turut andil dalam pengentasan masalah kemiskinan.

Cara yang dipakai adalah menghimpun dana dari anggota yang mampu, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali pada mereka yang sangat membutuhkan. Bantuan ini memang tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi tetap dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, mengingat masyarakat yang dikategorikan miskin sangat besar dan mereka memerlukan uluran tangan. Sifat bantuan ini untuk mendidik pada anggota agar melalui bantuan serta bimbingan secara intensif akan mampu mengembangkan sumberdaya manusia yang telah dimiliki.

LKM dan Pengentasan Kemiskinan

Secara umum pemecahan problematika kemiskinan telah disinggung dalam usaha Muhammadiyah mengatasi kemiskinan sebagaimana uraian di atas. Mengingat LKM sebagai lembaga pokok yang dikhususkan mengatasi kemiskinan, lebih lanjut akan diuraikan kembali. Bertitik tolak pada keadaan masyarakat, baik disadari atau tidak susunan masyarakat kita berlapis-lapis berdasarkan atas perbedaan pendidikan, sosial ekonomi ataupun bidang lainnya yang menghambat aktifitas serta hubungan satu dengan lainnya dalam arti kelas bawah akan merasa ruang geraknya untuk bergaul dengan lapisan yang lebih atas.

Akibat dari masalah ini, kelas bawah atau miskin semakin tersisih dalam percaturan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat pada terjadinya lapisan masyarakat serta penyebabnya sebagai berikut "Adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, yang menjadi alasan terjadinya lapisan dalam masyarakat dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat dan mungkin juga harta dan batasan-batasan tertentu (Sukamto, 1982).

Hal ini dapat dijadikan bukti nyata bahwa terjadinya lapisan masyarakat itu termasuk di dalamnya karena masalah ekonomi. Lebih tegas lagi lembaga keuangan masyarakat membentuk tiga lapisan sebagai anggota binaan dalam upayanya pengentasan kemiskinan. Lapisan-lapisan tersebut adalah lapisan bawah (miskin) dan lapisan yang dianggap berkecukupan dan mampu.

Lapisan yang dipandang mampu, diusahakan ikut serta dalam menghimpun dana yang dikelola oleh LKM sebelum disalurkan kembali pada masyarakat.

Lapisan yang dikategorikan pada golongan yang cukup tetapi diadakan pembinaan agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan lagi disamping turut serta meringankan beban bagi lapisan bawah (miskin).

Lapisan ini merupakan prioritas utama dari lembaga, karena mereka sangat memerlukan bantuan dan pembinaan secepatnya agar taraf kehidupannya dapat berubah lebih baik.

Dana yang dikelola LKM dalam pengembangan sumber daya manusia dalam upaya memberantas kemiskinan diperoleh dari anggota Muhammadiyah baik berupa iuran secara periodik ataupun tabungan para anggota serta sumbangan dari pusat. Langkah selanjutnya yang dilakukan LKM setelah dana terhimpun adalah *pertama*, memberikan sumbangan dalam bentuk uang, namun demikian tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak dikenakan bunga sedikitpun.

Kedua, memberikan pembinaan secara rutin dalam rangka peningkatan mental spiritual pada masyarakat binaan, *ketiga*, membangkitkan semangat pada anggota binaan agar menyadari bahwa mereka sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan *keempat*, memberikan sumbangan langsung dalam bentuk material yang bisa digunakan sebagai modal usaha dan pengembaliannya sesuai dengan sumbangan semula dalam jangka waktu yang disepakati sebelumnya. *Kelima*, usaha-usaha peningkatan kualitas hidup lainnya.

Peranan dan Manfaat LKM bagi Masyarakat

Peranan LKM ini tidak berbeda dengan peranan Muhammadiyah dalam masyarakat. LKM sendiri dibentuk dibawah naungan Muhammadiyah yang tetap mengupayakan untuk

mewujudkan kehidupan manusia yang adil dan makmur lahir dan bathin.

Dari sini diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang penuh perdamaian, persaudaraan, adanya kebebasan dan keadilan, tolong menolong antar sesama dalam kebajikan, adanya semangat untuk membangun, peningkatan ketakwaan terhadap Allah, berbudi pekerti yang luhur, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan lain-lain.

Manfaat LKM

Secara umum manfaat Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) antara lain adalah pertama Masyarakat golongan miskin potensial dapat mudah memperoleh dana untuk menutupi kebutuhan modal usaha. *Kedua*, masyarakat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola kegiatan/ usaha yang dilakukan paling dalam melakukan perhitungan dan *ketiga*, masyarakat terhindar dari keterikatan dengan para rentenir atau Bank titil yang beroperasi di daerahnya karena kebutuhan modal.

Profil Desa Paciran

Paciran, sebuah desa ibu kota Kecamatan dan merupakan wilayah kabupaten Lamongan. Desa ini terletak di pesisirpantai utara laut Jawa, pada ketinggian kurang lebih 2 meter di atas permukaan air laut. Secara geografisnya juga desa ini dilalui sebuah jalan mempunyai nilai sejarah yaitu jalan Deandees. Pada dasarnya desa ini terdiri dari beberapa dusun yaitu Penanjan, Jetak, Tengah dan Selempit. Pada tahun 1994, penduduk desa ini tercatat berjumlah kurang lebih 7.569 jiwa, terdiri 3.604 laki-laki dan 3.965 perempuan (selengkapnya lihat pada tabel 1).

Secara administratif, desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh dua orang masing-masing sebagai kepala dusun Jetak dan Penanjan. Dusun Tengah dan Selempit praktis-

nya langsung dibawah oleh kepala desa. Pada kenyataan sehari-hari dusun Tengah dan Selempit lebih dikenal dengan nama Paciran, kendatipun semuanya memang wilayah Paciran. Untuk memasuki wilayah ini, dapat ditempuh melalui beberapa jalur, dari arah timur lewat Gresik, dari arah barat lewat Tuban dan dari arah selatan lewat Lamongan Kota langsung melalui jembatan sungai solo di Laren

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Paciran Menurut Tingkat Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1994

USIA	Jenis Kelamin		
	Lk.	Pr.	
0 - 9 tahun	542	554	1096
10 - 14 tahun	246	286	532
15 - 19 tahun	664	721	1385
20 - 24 tahun	802	828	1631
25 - tahun	1344	1576	2925
Jumlah	3604	3965	7569

Sumber : Kantor Desa Paciran, 1994

Desa ini nampak sedikit erelatif mapan, strategis dan sedikit potensial pula. Dari segi penerangan desa ini sudah memanfaatkan aliran listrik dari PLN. Sarana informasi dan komunikasi juga relatif memadai, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Strategis karena letak desa ini pada jalur lintas perekonomian darat yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya, dan sedikit potensial karena sumberdaya alamnya (*natural resorces*) cukup mendukung perekonomian baik melalui darat maupun laut.

Dari segi perekonomian, mata pencaharian penduduk desa ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian (1) sebagai nelayan atau yang berkaitan dengan masalah perikanan sesuai dengan letak geografis desa tersebut, (2) petani atau yang berkaitan dengan masalah pertanian.

dan (3) mereka yang berada di luar dua kelompok tersebut, misalnya, pedagang, pegawai negeri, tukang batu, tukang kayu, tukang becak, guru, pracangan, buruh dan lain-lainnya. Sejenak memperhatikan kegiatan perekonomian masyarakat setempat, maka menatap cara hidup mereka nampak relatif sederhana, kendatipun secara teoritis memang tidak dapat disangkal sebagaimana pendapat Muchtar Lubis (Jawa Pos, 1986 :6) bahwa "*Bangsa Indonesia hanya mengenal dua pola kehidupan, yaitu pola hidup miskin dan pola hidup mewah*". Perbedaan yang sangat timpang ini mungkin nampak dominan dalam menandai kehidupan masyarakat perkotaan; kehidupan masyarakat pedesaan jauh berbeda karena budaya lata dan konsumerisme yang biasa menandai kehidupan masyarakat perkotaan jarang ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti di Paciran ini. Dengan tidak berpretensi menolak teori yang dicetuskan Muchtar, bahwa pada zaman kuno dahulu seorang filofos kenamaan Aristoteles pernah mengatakan bahwa dalam tiap-tiap negara/masyarakat jelas terdapat tiga unsur (stratifikasi sosial), yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang berada di tengah-tengahnya (Soerjono, 1985 :219). Sekalipun tidak terdapat sikap-sikap diskriminatif apalagi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, namun stratifikasi sosial dalam masyarakat ini jelas ada dalam arti ada yang kaya sekali ada yang miskin dan ada yang tengah-tengah.

Pelapisan sosial dalam masyarakat tentu tidak hanya didasarkan atas kekayaan sebagai ukuran, sehingga dapat mendudukan seseorang dalam tingkatan-tingkatan tertentu, namun juga didasarkan atas kedudukan atau pangkat seseorang dalam masyarakat. Pelapisan sosial dalam masyarakat yang didasarkan atas hal tersebut, membawa konsekwensi terdapat-

nya warga masyarakat yang termasuk dalam lapisan atas (*upper - class*) yang jumlahnya biasanya tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengahnya (*middle class*) dan lapisan bawah (*lower class*), dimana lapisan lapisan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk piramida sebagaimana berikut :

..... upper class
 middle class
 lower class

Pelapisan sosial yang didasarkan atas teori tersebut dalam masyarakat Paciran tercermin pada struktur kepemimpinan. Pada satu sisi terdapat pemimpin formal para aparat desa dan sisi yang lain juga terdapat pemimpin informal yang terdiri dari pemuka masyarakat. Dan termasuk dalam kategori pemimpin ini ialah para kyai atau tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh organisasi keagamaan terpenting terutama NU dan Muhammadiyah.

Namun jika diperhatikan lebih jauh mengenai peranan pemimpin informal itu, kini telah terjadi perubahan/pergeseran status maupun peranannya. Kyai atau ulama adalah pemimpin *Polymorphic* artinya bukan hanya pemimpin masalah keagamaan tetapi juga pemimpin masalah sosial dan politik. Kyai atau ulama adalah referensi ummat dalam melakukan ibadah ubudiyah maupun ibadah muamalah. Tetapi setelah pemerintah mengadopsi sistim *floating mass* dan kegiatan-kegiatan pembangunan diimplementasikan melalui saluran birokrasi, kyai atau ulama cenderung menjadi pemimpin *monomorphic* atau hanya dalam masalah keagamaan saja. Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian posisi kyai sebagai pemimpin informal di pedesaan masih kuat atau lebih lemah? Jawaban atas pertanyaan semacam ini adalah berdimensi ganda. Di satu pihak, kita mungkin beranggapan bahwa status dan peranan Kyai menjadi lebih kuat atau lebih mapan karena dapat ber-

konsentrasi pada masalah yang berkaitan pelaksanaan ibadah ubudiyah atau ibadah muamalah saja. Tetapi di lain pihak barangkali bisa beranggapan bahwa status dan peranan Kyai atau ulama semakin menurun karena tidak lagi mampu melakukan fungsi kontrol pada aktifitas eksekutif atau legislatif. Status dan peranan Kyai atau ulama menjadi marginal, *isolated* atau di pinggiran (Usman, 1994).

Sekalipun terjadi pelapisan-pelapisan sosial dalam masyarakat, namun yang penting untuk dipaparkan di sini bahwa interaksi sosial antara lapisan-lapisan tersebut sama sekali tidak terjadi kesenjangan, baik antara golongan yang dianggap "the have" dengan "the have not" maupun yang di "upper class" dengan "lower class". Sebagaimana juga layaknya dalam kehidupan masyarakat pedesaan bahwa interaksi sosial dengan pola hidup bersama di mana anggota-anggotanya terikat oleh hubungan bathin nampak dominan dalam menandai kehidupan masyarakat ini. Hubungan tersebut tentu terwujud karena didasari oleh rasa cinta dan kesatuan bathin yang memang telah menjadi kodrat manusia. Pola interaksi dan kebersamaan dalam masyarakat ini sering kali diwujudkan dalam bentuk gotong royong atau "resayan" dalam bahasa jawa; partisipasi mereka nampak apabila salah satu dari anggotanya mempunyai hajat; resepsi pernikahan, hitanan, perbaikan rumah dan terutama sekali yang untuk kepentingan bersama seperti, memperbaiki atau membangun tempat-tempat ibadah, pendidikan dan lain sebagainya, Partisipasi mereka tentu diwujudkan dalam batas-batas kemampuan baik secara moril maupun materiil.

Penduduk desa ini secara keseluruhan beragama Islam dan mayoritas taat menjalankan syaria agama, sehingga dalam tata kehidupan masyarakat ini nampak tercermin nilai-nilai keagamaan "suasana religius".

Terbentuknya suasana keagamaan dalam masyarakat ini bila ditelusuri lebih jauh maka akan ditemukan beberapa fakta sejarah yang diduga kuat memberikan andil besar dalam melatarbelakangi suasana tersebut. Di antaranya yang dapat disebutkan ialah sebagai berikut ; (1) adanya Makam Sunan Drajat yang terletak di desa Keranji sekitar 5 kilometer di sebelah timur desa Paciran (2) adanya Makam Raden Rahmat yang terletak di desa Sendang agung sekitar 2 kilometer sebelah selatan desa Paciran. (3) disamping dua fakta tersebut bahwa pada tahun 1930-an di desa Tunggul sekitar 3 kilometer arah timur Paciran terdapat sebuah Pesantren yang cukup ternama. Pengasuh utama pesantren ini ialah Kyai Amin (*almarhum*) dan kini pesantren tersebut terkenal dengan sebutan "al-Amin". Pesantren ini diduga mempunyai andil besar dalam melahirkan tokoh-tokoh agama di masyarakat sekitarnya, termasuk di desa Paciran ini. Bahkan orang nomor satu di lingkungan Muhammadiyah daerah Lamongan K.H. Abd. Rahman Syamsuri, pendiri dan pengasuh utama pondok pesantren Karangasem Paciran juga termasuk produk dari Kyai Amin. Pada sisi lain kondisi sosial ekonomi masyarakat juga banyak dipengaruhi suasana tersebut. Tanpa didukung kondisi sosial ekonomi yang sedikit relatif mapan, suasana keagamaan seseorang diduga labil "rapuh" dan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi tata kehidupan masyarakat.

Suasana religiusitas masyarakat dewasa ini nampak terlihat pada semaraknya beberapa tempat ibadah, mulai dari langgar yang relatif sederhana sampai pada masjid jami' yang relatif besar (sarana fisik keagamaan perhatikan tabel 2 dibawah ini). Penduduk setempat banyak berdatangan baik ke masjid maupun ke langgar-langgar terutama pada waktu sholat berjamaah. Suasana lain yang ikut menandai

semaraknya tempat ibadah ialah pada saat libur hari besar Islam misalnya, Hari Raya Idul Fithri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Isra' Mi'raj dan lain-lainnya.

Tabel 2

Sarana Fisik Keagamaan di Paciran Tahun 1994

Jenis Sarana	Jumlah
Masjid	5 buah
Langgar/Mushalla	38 buah
Jumlah	43 buah

Sumber: Kantor desa Paciran, 1994

Beberapa pusat pendidikan Islam kendati pun berbeda faham keagamaan (NU dan Muhammadiyah) juga banyak mewarnai suasana keagamaan masyarakat, terutama dengan adanya beberapa pondok pesantren (sarana pendidikan perhatikan tabel 3). Tidak tertinggal juga

Tabel 3

Sarana Pendidikan di Desa Paciran

Jenis Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Pendidikan Umum	SD Negeri 2 buah, SMP negeri 1 buah, SMA Negeri 1 buah, SMP PGRI 1 buah, SMEA Lab. 1 buah	6
Pendidikan Agama (NU, Muhammadiyah)	Madrasah Ibtidaiyah NU	1
	Madrasah Tsanawiyah NU	1
	Madrasah Aliyah NU	1
	SMP NU	1
	SMA NU	1
	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah	2
	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah	2
	Madrasah Aliyah Muhammadiyah	2
	SMP Muhammadiyah	1
	SMA Muhammadiyah	1
	Pondok Pesantren NU	1
	Pondok Pesantren Muhammadiyah	2
Perguruan Tinggi	STIT Muhammadiyah	2
	STIS Muhammadiyah	1
Jumlah		25

Sumber: Pencatatan penulis.

adalah suasana pengajian-pengajian keagamaan di masjid-masjid maupun di langgar-langgar. Lebih jauh lagi gambaran suasana keagamaan ini, bahwa pada saat-saat tertentu maupun tidak, maka akan terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dihafalkan baik di masjid, langgar maupun tempat-tempat lainnya.

Upaya Pengentasan Kemiskinan

Keinginan menanggulangi kemiskinan sebenarnya bukan suatu hal baru. Kalau kita simak lagi lembar-lembar PJP I, di sana terlihat bahwa menjelang pelaksanaan Repelita Ketiga (1979/1980 -1983/1984) yang lalu pemerintah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu: (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah kemiskinan, dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di segenap daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta kesempatan memperoleh keadilan. Tatkala itu disepakati lagi bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya mengejar

kemajuan lahiriah (seperti : sandang, pangan, papan dan kesehatan), melainkan juga bagi memenuhi kepuasan bathiniah (seperti : pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan). Bahkan pada saat itu juga ditegaskan lagi bahwa hasil-hasil pembangunan hendaknya merata ke seluruh penjuru tanah air; bukan hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat, tetapi dapat dirasakan oleh segenap anggota masyarakat.

Upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan malah semakin deras mencuat dipermukaan. Benar memang ada sejumlah pakar yang menyatakan bahwa apabila dibandingkan dengan keadaan beberapa negara di Asia, masyarakat Indonesia sudah memasuki kategori *moderate inequality* artinya perbedaan tingkat kemakmuran antara berbagai golongan dalam masyarakat mulai mendekat. Tetapi dalam kenyataannya jumlah golongan miskin masih besar, bahkan terus membengkak. Mengapa demikian ? Mengapa bermacam-macam program pembangunan ekonomi yang selama ini dicanangkan pemerintah tidak efektif ? Mengapa bermacam-macam bantuan dikucurkan pemerintah tidak menyentuh kelompok miskin ? Tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Persoalan itu memaksakan kita untuk lebih menelaah kembali dimensi struktural kemiskinan itu sendiri.

Secara sosiologis dimensi struktural kemiskinan itu dapat ditelusuri melalui *institutional arrangements* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Asumsi dasarnya adalah bahwa kemiskinan tidak semata-mata berakar pada "kelemahan diri", yang lazim digambarkan : (1) secara individual, ditandai sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality*

seperti : sikap parohial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior; (2) secara kolektif hidup dalam keluarga yang ditandai *free union or consensual marriages*, serta tidak terintegrasi secara efektif dengan institusi-institusi masyarakat. Tetapi kemiskinan itu terutama sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan strategi pembangunan ekonomi yang selama ini dicanangkan, serta pengambilalihan posisi pemerintah dalam perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi itu sendiri (Usman, 1994).

Setelah dilakukan penelitian tahap awal tentang "Nelayan dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) Muhammadiyah, Studi pola hubungan dan model pengentasan kemiskinan di desa Paciran Kabupaten Lamongan, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

A. Nelayan dan Kehidupannya

Penduduk Paciran yang bekerja sebagai nelayan kecil jumlahnya mencapai 212 orang atau 26 persen dari jumlah penduduk kondisi sosial ekonominya mayoritas masih tergolong kelompok miskin (lapisan bawah) yang memerlukan santunan / bantuan baik berupa modal uang atau material lainnya. Disadari bahwa hal ini secara nyata kondisi ini tidak memungkinkan penduduk nelayan dapat meningkat apabila hanya mata pencaharian hanya sebagai nelayan kecil dengan perahu kecil pula. Perolehan pendapatannya hanya cukup dapat dimakan sehari atau dua hari dan bila nelayan itu mujur, paling-paling hanya dapat mencukupi kebutuhan pokok selama satu minggu. Jika di desa ini terdapat beberapa gelintir orang (kurang dari 1 persen dari nelayan) yang tergolong agak kaya ini karena disamping ia sebagai nelayan kecil ia juga mempunyai usaha sampingan di rumah, seperti yang penulis lihat yaitu, membuka pracangan, kios kecil atau jual bensin dan usaha-usaha lainnya.

Kondisi semacam ini telah bertahun-tahun sebagai warisan dari nenek moyangnya. Menurut wawancara penulis kepada beberapa nelayan kondisi dan hidup semacam itu telah diwariskan oleh generasi ke generasi, sehingga seolah-olah nelayan sulit melakukan perubahan kehidupan nelayan tradisional itu. Tidak ada model atau teknologi penangkapan ikan yang lebih baik yang mendukung produktifitas nelayan. Nelayan tidak mudah terpengaruh oleh teknologi baru dalam perikanan. Setelah ditelusuri ditemukan penulis ada semacam keawattiran para nelayan jika menggunakan teknologi modern jumlah ikan di daerahnya yang dianggap "common property" bagi warga desa ini akan habis. Rasa solidaritas dan kebersamaanya serta rasa senasib bagi sesamanya sangat kuat. Ini menyebabkan meskipun sesorang mampu membeli alat penangkap ikan modern, ia menngurungkan niatnya untuk membeli demi solidaritas dan kebersamaan sesamanya. Motorisasi di desa ini telah dimanfaatkan oleh hampir semua nelayan yaitu menggunakan motor kecil tetapi masih tetap menggunakan perahu yang sama. Namun alat penangkap ikan dan cara-cara tradisional masih tetap dilakukan sehingga dari segi produktifitas tidak berbeda dengan menggunakan "welah, atau dayung tradisional. Kalau toh menggunakan motor hanya dapat mengurangi tenaga dan mempercepat waktu "miyang" atau melaut. Kalau dahulu menggunakan "welah" (alat untuk mengayuh) membutuhkan waktu kerja sekitar 9 sampai 10 jam setiap hari (pergi pada jam 5 pagi pulang sampai di rumah sekitar jam 00.14 atau 00.15. Dengan menggunakan motor rata-rata setiap hari hanya 6 jam.

Hidup sebagai nelayan kecil tidak sama dengan petani atau kerja pada sektor-sektor lain. Nelayan di desa ini memiliki kebiasaan hidup "kesenangan sesaat". Pada musim mujur

(mayang) biasanya pada musim kemarau nelayan-nelayan yang mujur menggunakan uangnya untuk bersenang-senang, misalnya membeli barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan dalam situasi kehidupannya, yaitu barang-barang elektronik, pakaian, perhiasan dan barang-barang lain yang kontras dengan kehidupannya. Ketika musim "angin barat" yang biasanya diikuti dengan ombak laut yang besar yang terjadi pada musim hujan, nelayan biasanya menamakan musin "paceklik" bagi nelayan, dimana mereka tidak bisa melaut hampir dua bulan lamanya lalu mereka menjual semua barangpembeliannya atau menggadai-kan ke kota untuk menutup kebutuhan pokok yaitu makan selama datang musim tersebut. Bagi nelayan yang memiliki kemampuan lain dan bisa bekerja di sektor lain, menurut pengamatan penulis jumlahnya sangat sedikit, pada saat itu mereka biasanya mencari kerja sampingan sesuai dengan kemampuannya itu.

Cara hidup semacam ini masih terlihat hingga kini namun sudah ada sedikit perubahan karena seiring dengan perkembangan masyarakat desa ini yang dipengaruhi oleh alat komunikasi dan transportasi menjadikan desa ini agak sedikit terbuka bagi masyarakat kota atau desa lainnya. Karena itu maka pengetahuan masyarakat juga mulai berkembang. Pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan hasil tangkapan ikan yang dahulu didistribusikan hanya sampai pada pasar desa, maka muncul cara-cara bagaimana mengawetkan ikan dan harga tetap atau bahkan lebih baik. Lalu muncul pengeringan ikan. Disini jelas muncul juragan-juragan atau tengkulak-tengkulak untuk dapat membeli ikan secara langsung kepada para nelayan sebelum dibawa ke pasar dan nelayan pun sangat senang karena isteri-isteri mereka tidak perlu lagi menjajakan ikannya ke pasar tetapi langsung dibeli para tengkulak tersebut. Akibatnya

harga ikan di pasar sedikit naik karena berkurangnya ikan yang dijual di pasar. Masyarakat yang biasanya langsung membeli dari para nelayan sekarang kemudian membeli pada tengkulak. Hubungan antara nelayan dan tengkulak akhirnya berkembang menjadi "patron-clean". Bagi nelayan diberi kemudahan untuk meminjam uang kepada tengkulak tetapi setiap hari hasil tangkapannya harus dijual kepadanya. Pada awal-awalnya merasa senang karena misalnya pada masa-masa sulit tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup atau biaya sekolah anaknya mereka langsung saja pinjam kepada tengkulak. Bagi tengkulak dengan pinjaman itu merasa telah mengikat para nelayan untuk menjual ikan kepadanya.

Hubungan ini lama kelamaan disadari oleh para nelayan bahwa ini dianggap sering merugikan mereka sendiri. Hubungan semacam ini pada awal-awalnya oleh teori Durheim disebut sebagai kesadaran palsu. Pada saat harga ikan melonjak pada pasaran umum, para tengkulak tidak mengikuti harga tersebut tetapi tetap menggunakan harga minimal yang berlaku sebelumnya. Tetapi sebaliknya pula jika harga ikan menurun mereka ikut menurunkan harga tersebut. Posisi nelayan menjadi terjerat dan pada akhirnya justeru nelayan menjadi lebih miskin dengan adanya kemudahan dari para tengkulak. Karena dengan memanfaatkan kemudahan itu kebutuhan para nelayan menjadi kurang terkontrol. Dari pengamatan yang dilakukan penulis banyak nelayan meminjam uang hanya untuk kebutuhan yang bersifat sekunder yang menurut ukuran umum kehidupan para nelayan dianggap belum perlu. Tanggungan utang lebih banyak sementara kerja sebagai nelayan hasilnya tidak dapat direncanakan, diperhitungkan dan diperkirakan setiap harinya.

B. Upaya LKM Mengentas Kemiskinan Nelayan desa Paciran

1. Tingkat hidup anggota binaan

Dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan ini, LKM sebagai proyek Pilot Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPMSDM) menjadikan masyarakat yang ada di lapisan bawah sebagai anggota binaan.

Dalam rencana jangka panjang, proyek ini diharapkan akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat kelas bawah sehingga secara perlahan-lahan taraf kehidupannya dapat terangkat. Pada saat ini, dalam usianya yang masih relatif muda, LKM membuat proyek percontohan pengentasan kemiskinan (dhuafa'). Desa Paciran merupakan salah satu yang dipilih oleh Pimpinan Pusat sebagai percobaan proyek ini disamping desa-desa atau kota-kota di Jawa Timur lainnya. Ruang gerak LKM ini masih terbatas pada mereka yang sangat memerlukan bantuan, dari binaan sendiri ada usaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilannya, serta kemampuan yang dilakukan pengurus, seluruh binaan adalah sesuai dengan kriteria sebagai berikut, Pertama, *usia binaan*. Yang menjadi anggota binaan usianya berkisar antara 20 sampai 66 tahun, kedua, *Pendidikan binaan*. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh anggota binaan adalah dari tidak lulus Sekolah Dasar (pernah Sekolah) sampai lulus Sekolah Menengah Tingkat Atas, Ketiga, *Pekerjaan Binaan*. Jenis Pekerjaan anggota binaan antara lain, nelayan, petani, tukang batu, peternak ayam, pedagang kecil, pengecer minyak tanah, pembuat kuwe, pedagang pracangan, penjahit, tukang becak, tengkulak ikan, guru, tukang kayu dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil populasi pekerja nelayan. Hal ini diang-

gap paling menarik bagi penulis karena disamping pekerja nelayan jumlahnya lebih banyak daripada jenis pekerjaan yang lain. Disamping itu nelayan merupakan jenis pekerjaan yang tidak banyak berkembang meskipun program pemerintah telah banyak dilakukan, seperti teknologi perikanan, motorisasi dan lain-lain. Keempat, *penghasilan binaan*. Penghasilan binaan dalam setiap bulannya masih relatif kecil. Sementara jumlah anggota keluarga yang ditanggung antara 4 sampai dengan 6 orang. Penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari semua jenis pekerjaan tersebut di atas rata-rata berkisar antara 20 ribu sampai 60 ribu per bulan.

2. Jenis Bantuan yang diberikan

Dalam upayanya meningkatkan penghasilan setiap anggota, Muhammadiyah melalui LKM memberikan bantuan, salah satunya berupa tambahan modal usaha. Jumlah bantuan yang diberikan besarnya mulai dari 10.000 hingga 300.000,- setiap anggota. LKM dalam memberikan bantuan yang berupa dana tersebut kepada setiap anggota yang penghasilannya sama, besar bantuan yang diberikan adalah sama. Namun jangka waktu pengembaliannya bisa berbeda-beda. Masalah ini berkaitan dengan tingkat pendapatan anggota setiap bulan. Selain itu, kesepakatan antara pengurus LKM dengan anggota binaan sangat diperlukan, sehingga anggota tidak merasa keberatan, bahkan akan timbul kesadaran untuk mengembalikan pinjaman itu.

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan ini lembaga ini, biaya operasionalnya berdasar atas kesepakatan nilai bagi hasil dari modal usaha yang disalurkan kepada anggota binaan.

Jasa bagi hasil ini dimaksudkan bahwa dari kedua belah pihak baik LKM maupun anggota binaan sama-sama mendapatkan keuntungan. Jumlah nilai bagi hasil ditentukan sebesar 4 % untuk pinjaman yang waktu pengembaliannya

antara satu bulan sampai dua puluh minggu.

Pemberian pinjaman bagi nelayan berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya. Nelayan yang semula dikendalikan oleh para tengkulak yang mencari keuntungan sendiri kini beralih hubungan dengan LKM. Tidak terlalu berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh para tengkulak ikan seperti yang telah diuraikan di atas, LKM menggeser peran dominan tengkulak. Penjualan ikan dan udang disalurkan oleh LKM dengan harga di atas standar umum. Karena itu upaya LKM adalah membangun jaringan-jaringan penyaluran ikan pada pedagang-pedagang di kota. Upaya ini semata-mata untuk mengentaskan kemiskinan nelayan dan memberikan semangat untuk bekerja keras. Dengan cara ini nelayan memperoleh kemudahan meminjam dana kepada LKM. Tetapi LKM juga terlebih dahulu melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh nelayan anggota binaan. Apabila meminjam untuk sesuatu yang dianggap kurang penting maka tidak diperbolehkan oleh LKM. Selama untuk kebutuhan pokok dan pendidikan anak akan selalu diluluskan. Hal ini bertujuan untuk supaya tidak terjadi pemborosan, hidup berfoya-foya dan lain-lain. Dengan adanya kontrol semacam kedua belah pihak merasa senang.

Bagi nelayan yang memiliki usaha sampingan di rumah seperti pracangan, warung kecil, kios dan jualan bensin sangat didukung oleh LKM untuk dapat mengembangkan usahanya tersebut. Mereka ini diberi pinjaman modal usaha untuk lebih meningkatkan usahanya sehingga diharapkan pekerjaan ini lebih menjadi pekerjaan pokoknya dari pada sebagai nelayan. Sementara yang memiliki ketrampilan lain disamping ia sebagai nelayan, misalnya menarik becak dengan cara menyewa becak pada seorang juragan becak pada musim hujan (musim dimana para nelayan tidak melaut), ia diberi

pinjaman lunak sehingga dapat membeli becak sendiri. Pinjaman tersebut dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara nelayan dengan pengurus LKM. Ketika penulis melakukan observasi kepada Lembaga ini, penulis memperoleh data terdapat 25 nelayan muda yang telah memiliki becak sendiri dari modal pinjaman LKM sementara jumlah pemuda nelayan penarik becak ada 124 orang.

3. Manajemen Rumah Tangga (MRT)

Manajemen Rumah Tangga (MRT) ini diberikan kepada anggota binaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana yang diperoleh dari LKM. Dari dana yang jumlahnya tidak terlalu besar tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif saja. Bagi anggota yang sudah mempunyai usaha kecil-kecilan dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sedang bagi mereka yang sifatnya masih akan merintis, pengurus LKM akan ikut serta membantu memberikan masukan, usaha apa yang bisa dilakukan oleh anggota dengan bantuan modal dari LKM tersebut, serta bagaimana cara mengelolanya, sehingga untuk tahun permulaan akan membawa hasil. Selanjutnya LKM juga terus membantu sampai anggota benar-benar bisa mandiri.

4. Cara Mengevaluasi Bantuan

Untuk mengevaluasi bantuan yang diberikan kepada anggota binaan, semua unsur LKM akan terlibat. Dimulai dari bawah, ketua LKM primer dibantu oleh pengurus serta ketua-ketua kelompok dari anggota binaan, karena mereka berhubungan langsung dengan anggota. Dari sini perkembangan terjadi terus menerus dapat diketahui. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap para anggota binaan ini, yang pertama dilihat adalah bantuan yang diberikan apakah sudah dimanfaatkan pada usaha-usaha yang produktif atau belum. Apabila belum, anggota harus diarahkan lagi sehingga bantuan tadi benar-

benar akan bermanfaat bagi anggota binaan. Sedangkan yang sudah, akan dilihat pada hasil pengembalian pinjaman modal yang waktunya sudah disepakati sebelumnya, baik setiap hari, setiap minggu sekali atau setiap sebulan sekali. Kalau sudah sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, pembinaan dapat dikatakan membawa hasil.

Jika yang terjadi sebaliknya, misalnya binaan merasa keberatan mengembalikan pinjaman modal pada LKM, maka sebabnya harus diketahui sekaligus diberikan jalan keluar.

Dari hasil evaluasi pada tiap kelompok ini, ditampung di LKM primer baik dalam bentuk tertulis maupun saran-saran lisan. Ini akan dijadikan sebagai masukan bagi pengurus agar nantinya dapat membenahi kekurangan-kekurangan dalam mengadakan pembinaan pada anggota untuk cara-cara yang lebih efektif dan tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hasil penilaian yang diperoleh dari seluruh LKM primer ini dipadukan dengan evaluasi dari daerah lain oleh pengurus LKM sekunder. Pada tahap akhir akan diketahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai juga kekurangan yang masih memerlukan perbaikan lagi.

Evaluasi ini pada dasarnya selain untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada para anggota binaan sekaligus mengetahui kekurangan yang perlu dibenahi di dalam kepengurusan selanjutnya.

Kesimpulan

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di desa Paciran Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Masyarakat sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah telah kami sajikan sesuai dengan penelitian awal. Mengingat masalah yang dibahas ini masih terus berkembang baik yang berkenaan dengan konsep dan pengembangan program-program LKM maupun

yang berkenaan tanggapan masyarakat Paciran itu sendiri. Untuk itu masih perlu dilakukan atau diadakan penelitian tahap-tahap berikutnya.

Pada tahap pertama penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dalam memasuki era globalisasi dan informasi yang terjadi pada saat ini taraf kehidupan masyarakat tampak semakin mapan. Terlepas dari masalah itu, ternyata masalah kesenjangan sosial tidak bisa dihindari. Kemiskinan seolah-olah memang sudah mempunyai tempat tersendiri di dalam masyarakat. Namun kemiskinan apapun di desa maupun di kota tetap masih pula dapat diatasi apabila kita masih menganggap masalah itu penting. Sekiranya demikian maka lembaga-lembaga misalnya LSM, ORMAS dan Organisasi-organisasi yang concern terhadap masalah sosial tetap dipandang mampu untuk melakukan itu.
- Untuk mengatasi masalah kemiskinan, tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah. Masalah ini sudah jelas berkaitan dengan masalah kemanusiaan (*social concern*) pada umumnya. Oleh karena itu baik instansi pemerintah, swasta, lembaga-lembaga sosial, apalagi lembaga keagamaan, sudah seharusnya menjadi pelopor dalam mengatasi masalah kemiskinan ini.
- Muhammadiyah sebagai lembaga agama merasa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk turut serta mengembangkan potensi yang dimiliki para anggotanya. Diharapkan mereka akan dapat memanfaatkan bantuan dari LKM semaksimal mungkin untuk usaha yang produktif. Dengan demikian semakin lama hasilnya semakin luas dan optimal.
- Dari hasil penelitian pendapatan anggota binaan sebelum di adanya LKM ini masih dibawah standar untuk sekedar cukup bagi anggota keluarganya. Namun setelah mengikuti / menjadi anggota binaan memperoleh/menciptakan kerja sambilan sehingga pendapatanpun bertambah.
- Rata-rata tingkat pendidikan anggota binaan masih sangat rendah. Mereka tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak jika yang dipakai sebagai syaratnya adalah tingkat pendidikan formal.
- Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Muhammadiyah melalui Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) membentuk kelompok-kelompok anggota binaan yang didasarkan atas binaan yang masih berusia produktif. Hal ini dimaksudkan agar kemungkinan untuk membantu keluarga mempunyai waktu panjang.
- Ada faktor penting yang nampaknya juga mempunyai peranan kuat sehingga memperhambat keinginan masyarakat desa Paciran untuk segera memacu peningkatan ekonominya. Faktor itu ialah "*religious consciousness*", kesadaran keagamaan yang mendalam yang secara tidak langsung mempengaruhi cita-cita hidup nelayan pedesaan pantai utara. Hal ini didasarkan pada data mengenai agama yang dianut para pelayan yaitu pemeluk Islam yang sebagian besar fanatik. Falsafah hidup nelayan di desa ini sangat sederhana. Bagi nelayan banyak sedikitnya hasil tangkapan ikan adalah "*rizqi*" dari Tuhan merupakan prinsip. Sehingga ini justru menguatkan dan menyadarkan posisinya sebagai nelayan tradisional dan ini diyakini sbagai "*nasib*" yang diberikan kepadanya. Lebih jauh lagi pandangan semacam ini membawa implikasi pada nelayan tidak merasa tertarik dengan usaha-usaha pemerintah dalam modernisasi perikanan.

Namun setelah dilihat lebih jauh tanpa disadari ternyata para nelayan ini masih ingin memperbaiki kehidupannya, buktinya dengan prgram LKM yang diluncurkan oleh Muhammadiyah, sebagian besar nelayan tertarik menjadi anggota untuk mendapatkan kredit atau pinjaman-pinjaman lainnya guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga disamping pendapatan dari penangkapan ikan yang hasilnya tidak menentu. Ini menunjukkan bahwa para nelayan lebih tertarik untuk mengembangkan ekonomi dari sektor lain daripada menangkap ikan itu sendiri.

Daftar Bacaan

- Mubyarto, Loekman Sutrisno, Michael Dove, *Nelayan Dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984
- H. Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas Kebijaksanaan, dan Manajemen*, Yogyakarta, MW Mandala, 1994.
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pers, 1985.
- Jawa Pos, tahun 1986.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, *Buku Laporan Kerja tahun 1991 -1993*.
- Sunyoto Usman, *Konsep perubahan Sosial*, Paper, 1994.
- , *Dimensi Struktural Kemiskinan*, Paper, 1994.
- , *KOnsep dan Stigma Kemiskinan*, Paper, 1994.